

***GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA
PROGRAM BANK SAMPAH DI KECAMATAN ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

RIZKI ANA ANGGITIA

NIM. 07011282025113

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

***GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA
PROGRAM BANK SAMPAH DI KECAMATAN ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh:

**RIZKI ANA ANGGITIA
NIM. 07011282025113**

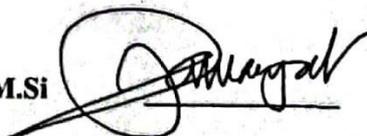
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2024

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

**Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005**



18/01/2024

**Mengetahui
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PADA
PROGRAM BANK SAMPAH DI KECAMATAN ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:
RIZKI ANA ANGGITIA
NIM. 07011282025113

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 25 Januari 2024

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. **Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si**
NIP. 198801272019031005



Penguji :

1. **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**
NIP. 196911101994011001



2. **Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 197905012002121005



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Ana Anggitia

NIM : 07011282025113

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Good Environmental Governance Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang ditetapkan kepada saya.

Demikian pernyataan yang dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,
Palembang, 15 Januari 2024



Rizki Ana Anggitia
NIM. 07011282025113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“To get something you never had, you must do something you never did!”

(Neil Amstrong)

“Semakin tinggi impianmu, semakin besar harapanmu, maka semakin besar pula usahamu. Ambil peranmu, percaya pada dirimu!”

(Rizki Ana Anggitia)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

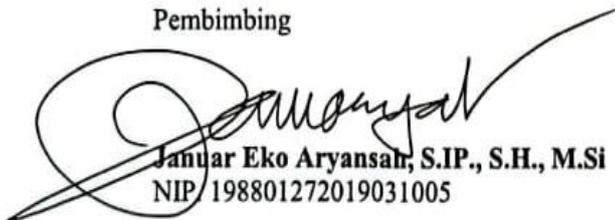
1. *Allah S.W.T*
2. *Kedua Orang Tuaku, Bapak dan Ibuku Tercinta*
3. *Keluargaku*
4. *Sahabat-sahabatku*
5. *Almamater kebanggaanku*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *good environmental governance* pada program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu peningkatan jumlah sampah di Kota Palembang dan Kecamatan Ilir Barat I sebagai wilayah dengan sumbangsih sampah terbanyak di Kota Palembang. Dalam rangka mengatasi masalah sampah tersebut, pemerintah Kota Palembang membentuk dan mengadaptasi program Bank Sampah sebagai salah satu upaya menangani sampah melalui pengurangan sampah. Sebagai program penanganan lingkungan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, maka harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance*. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good environmental governance* belum terlaksana dengan baik pada pelaksanaan program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan prinsip *good environmental governance* menurut APFED (2009) yaitu *awareness, empowerment, coordination, dan enforcement*, hanya prinsip *empowerment* dan *coordination* yang sudah cukup dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat kendala di dalamnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses informasi, pengawasan dan penegakan belum dilaksanakan dengan baik, dan responsifitas pemerintah terbilang rendah. Hasil analisis penelitian ini merekomendasikan dibuatnya aturan khusus yang mengatur Bank Sampah dan dilakukan asesmen program sebagai bentuk evaluasi untuk keberhasilan program Bank Sampah kedepannya.

Kata kunci : *Good Environmental Governance*, Pengurangan Sampah, Bank Sampah

Pembimbing



Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, Januari 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



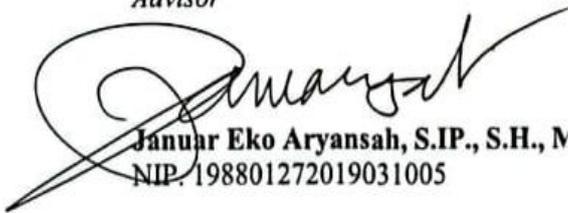
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the principles of good environmental governance in the Waste Bank program in Ilir Barat I District, Palembang City and the factors that hinder its implementation. The background to this research is the increase in the amount of waste in Palembang City and Ilir Barat I District as the areas with the largest waste contribution in Palembang City. In order to overcome the waste problem, the Palembang City government established and adapted the Waste Bank program as an effort to deal with waste through waste reduction. As an environmental management program to realize good environmental governance, it must be balanced with the application of the principles of good environmental governance. This research is qualitative descriptive research, with primary and secondary data sources, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the principles of good environmental governance have not been implemented well in the implementation of the Waste Bank program in Ilir Barat I District, Palembang City. Based on the principles of good environmental governance according to APFED (2009), namely awareness, empowerment, coordination and enforcement, only the principles of empowerment and coordination have been implemented quite well even though there are still obstacles in them. This is due to several factors, namely lack of public awareness, lack of access to information, supervision and enforcement have not been implemented properly, and government responsiveness is relatively low. The results of this research analysis recommend that special regulations be made to regulate the Waste Bank and carry out a program assessment as a form of evaluation for the success of the Waste Bank program in the future.

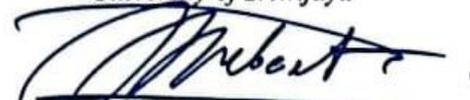
Keywords : Good Environmental Governance, Waste Reduction, Waste Bank

Advisor



Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, January 2024
Chairman of The Department Public Administration
Faculty of Social and Political Science
University of Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “*Good Environmental Governance Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Proposal Skripsi ini dibuat untuk mengajukan Skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan masa studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan diiringi dengan do’a semoga bantuan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang baik dari Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Joko Sungkono dan Suwarni yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, bimbingan, motivasi, serta do’a tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakakku, Rian Ardhie Wibowo dan Meyzela Jurnita, serta Adikku, Dian Prasasti yang terus memberikan motivasi, semangat, dan segala dukungannya bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada keponakanku tercinta, Zalfatunissa Putri Wibowo yang secara tidak langsung memberikan semangat kepada penulis.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembekalan kepada penulis.
6. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH, M.Si selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan waktu dan ilmunya, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Proposal Skripsi ini.

7. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal penulis mengemban studi di Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya.
8. Para Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang senantiasa memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga akhir.
9. Para staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bantuan, kemudahan dan dukungan dalam segala proses administrasi selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Pegawai dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020 yang telah saling menguatkan serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, namun telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan Proposal Skripsi ini.

Indralaya, Januari 2024

Penulis

RIZKI ANA ANGGITIA

NIM. 07011282025113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tata Kelola Lingkungan yang Baik.....	16
2.1.1 <i>Good Environmental Governance</i>	16
2.1.2 Prinsip <i>Good Environmental Governance</i>	20
2.2 Kebijakan Publik	24
2.3 Sampah	26
2.4 Pengelolaan Sampah.....	27
2.5 Bank Sampah.....	29
2.6 Teori yang Digunakan	31
2.6.1 <i>Awareness</i> (Kesadaran/Kepedulian).....	32
2.6.1.1 Dilakukannya Asesmen Masalah	34
2.6.1.2 Pemberian Akses Informasi bagi Masyarakat.....	34
2.6.2 <i>Empowerment</i> (Pemberdayaan).....	35

2.6.2.1 Partisipasi Masyarakat	36
2.6.2.2 Keswadayaan Masyarakat dalam Mengelola Program	37
2.6.3 <i>Coordination</i> (Koordinasi)	38
2.6.3.1 Komunikasi antara Pemerintah, Pengelola Program dengan Masyarakat	39
2.6.3.2 Kontinuitas (Keberlanjutan) Koordinasi dan Program	39
2.6.4 <i>Enforcement</i> (Penegakan)	40
2.6.4.1 Penegakan Program	40
2.6.4.2 Pengawasan Terhadap Program	41
2.7 Penelitian Terdahulu	42
2.8 Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Jenis Penelitian	60
3.2 Definisi Konsep	60
3.3 Fokus Penelitian	61
3.4 Jenis dan Sumber Data	61
3.5 Informan Penelitian	62
3.6 Teknik Pengumpulan Data	63
3.7 Teknik Analisis Data	63
3.8 Teknik Keabsahan Data	65
3.9 Sistematika Penulisan	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
4.1.1 Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	68
4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	69
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	70
4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	71
4.1.2.3 Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	72
4.1.2.4 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	90
4.1.3 Bank Sampah Kartini	92

4.2 Penyajian Data.....	95
4.2.1 <i>Good Environmental Governance</i> Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	96
4.2.1.1 <i>Awareness</i> (Kesadaran/Kepedulian)	98
4.2.1.1.1 Dilakukannya Asesmen Masalah	98
4.2.1.1.2 Pemberian Akses Informasi bagi Masyarakat	105
4.2.1.2 <i>Empowerment</i> (Pemberdayaan)	109
4.2.1.2.1 Partisipasi Masyarakat.....	110
4.2.1.2.2 Keswadayaan Masyarakat dalam Mengelola Program	113
4.2.1.3 <i>Coordination</i> (Koordinasi)	121
4.2.1.3.1 Komunikasi antara Pemerintah, Pengelola Program, dengan Masyarakat	121
4.2.1.3.2 Kontinuitas Koordinasi dan Program.....	123
4.2.1.4 <i>Enforcement</i> (Penegakan)	126
4.2.1.4.1 Penegakan Program.....	126
4.2.1.4.2 Pengawasan Terhadap Program	128
4.3 Interpretasi Teoritik	130
4.3.1 <i>Good Environmental Governance</i> Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	131
4.3.1.1 <i>Awarenes</i> (Kesadaran)	132
4.3.1.1.1 Dilakukannya Asesmen Masalah	134
4.3.1.1.2 Pemberian Akses Informasi Bagi Masyarakat	135
4.3.1.2 <i>Empowerment</i> (Pemberdayaan)	136
4.3.1.2.1 Partisipasi Masyarakat.....	138
4.3.1.2.2 Keswadayaan Masyarakat dalam Mengelola Program	139
4.3.1.3 <i>Coordination</i> (Koordinasi)	140
4.3.1.3.1 Komunikasi antara Pemerintah, Pengelola Bank Sampah, dengan Masyarakat	141
4.3.1.3.2 Kontinuitas (Keberlanjutan) Koordinasi dan Program	142
4.3.1.4 <i>Enforcement</i> (Penegakan)	143
4.3.1.4.1 Penegakan Program.....	144
4.3.1.4.2 Pengawasan Terhadap Program	145

4.4 Faktor Penghambat/Kendala <i>Good Environmental Governance</i> pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I.....	149
BAB V PENUTUP.....	151
5.1 Kesimpulan.....	151
5.2 Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Tahun 2022	3
Tabel 2.	Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022	4
Tabel 3.	Jumlah Timbulan Sampah Kota Palembang Tahun 2019-2022.....	5
Tabel 4.	Perkiraan Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I	6
Tabel 5.	Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I yang Terangkut ke TPA Sukawinatan Tahun 2023	7
Tabel 6.	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 7.	Fokus Penelitian	61
Tabel 8.	Luas Wilayah, Jarak Ke Ibukota Kecamatan, Jarak Ke Ibukota Kota Per Kelurahan Tahun 2022	68
Tabel 9.	Jumlah RW dan RT Per Kelurahan Tahun 2022.....	69
Tabel 10.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Per Kelurahan Tahun 2022.....	69
Tabel 11.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Agustus 2020	90
Tabel 12.	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Agustus 2020	91
Tabel 13.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Per Agustus 2020	91
Tabel 14.	Daftar Pengurus Bank Sampah Kartini	93
Tabel 15.	Daftar Bank Sampah Masyarakat Kecamatan Ilir Barat I.....	102
Tabel 16.	Daftar Pengurus Bank Sampah Kartini	114
Tabel 17.	Matriks Hasil Temuan Penelitian	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Effective Environmental Governance</i>	22
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	57
Gambar 3. Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles and Huberman	65
Gambar 4. Mekanisme Kegiatan Bank Sampah Kartini.....	95
Gambar 5. TPS di Sebelah Bank Sampah Kartini	108
Gambar 6. Alat Pencacah Plastik.....	118
Gambar 7. Bak Pupuk Cair.....	118
Gambar 8. Timbangan	118
Gambar 9. Mesin Pecacah Kompos.....	118
Gambar 10. Pupuk Kompos.....	119
Gambar 11. Kerajinan.....	119
Gambar 12. Sosialisasi DLHK Kota Palembang	122
Gambar 13. Sosialisasi DLHK Kota Palembang dan Kecamatan Ilir Barat I di Bank Sampah Kartini	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan menjadi suatu masalah yang sangat krusial dan tidak ada habisnya di Indonesia. Padahal, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita, khususnya di bidang kesehatan. Lingkungan mengalami degradasi akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengedepankan prinsip kelestarian ekologis. Salah satu permasalahan lingkungan yaitu sampah.

Masalah sampah menjadi salah satu fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), tepatnya pada poin 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, poin 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dan poin 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Poin-poin tersebut menekankan pengelolaan masalah sampah dengan prinsip *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Pada poin 6 yang berkaitan dengan penciptaan sanitasi layak, sampah merupakan salah satu dari kelima pilar sanitasi yang harus diselesaikan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, bahkan ke badan air tentu dapat mengurangi kualitas air sehingga dapat menyebabkan krisis air bersih. Pada poin 11 yaitu penciptaan kota dan permukiman yang berkelanjutan, sampah perkotaan juga menjadi salah satu bidang yang sangat diperhatikan dan perlu ditangani untuk mengurangi wilayah kumuh sehingga dapat mewujudkan permukiman layak dengan kondisi lingkungan yang baik. Kemudian, pada poin 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga memfokuskan pada masalah sampah. Hal ini dikarenakan pola konsumsi dan produksi yang

berlebihan dan tidak memperhatikan aspek berkelanjutan dapat meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan dan tentunya dapat merusak kelestarian lingkungan.

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa dari aktivitas kehidupan sehari-hari dan/atau yang berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah di masyarakat tentu berbanding lurus dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan, setiap rumah tangga akan menghasilkan sampah setiap harinya akibat dari aktivitas yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanganan sampah yang bertanggung jawab. Padahal, tidak semua sampah tersebut dapat terangkut untuk dibawa ke TPA, karena jumlah timbulan sampah tidak seimbang dengan kondisi lahan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya upaya penanganan atau pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah merupakan tindakan untuk mengumpulkan, memilah, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah timbulan sampah yang nantinya dibawa ke pembuangan akhir. Namun masih banyak terdapat kendala dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia yaitu jumlah sampah yang dihasilkan tinggi, pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, jumlah TPA yang terbatas, institusi pengelola sampah dan masalah anggaran (Kardono dalam (Mahyudin, 2017)).

Data dari *The Economics Intelligence Unit* tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua sebagai penghasil sampah terbesar di dunia setelah Cina (Utari dkk., 2023). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara akumulatif timbulan sampah di Indonesia tahun 2022 sekitar 35 juta ton per tahun. Dari total tersebut baru 62,06% atau sekitar 21 juta ton sampah yang terkelola, dan masih

terdapat 37,94% atau sekitar 13 juta ton sampah yang tidak terkelola. Dimana sampah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga dengan jenis sisa makanan dan sampah plastik. Terdapat beberapa provinsi sebagai penghasil sampah terbanyak di tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Tahun 2022

No.	Provinsi	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)
1.	Jawa Tengah	5.330.406,30
2.	Jawa Timur	4.954.299,38
3.	Jawa Barat	4.894.648,33
4.	DKI Jakarta	3.112.381,40
5.	Banten	2.627.865,54
6.	Sumatera Utara	1.906.079,33
7.	Sumatera Selatan	1.326.447,73
8.	Bali	1.027.433,75
9.	Sulawesi Selatan	908.859,45
10.	Riau	830.371,37

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat 10 provinsi sebagai penghasil sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2022 yaitu Jawa Tengah sebagai urutan pertama dengan jumlah sampah 5.330.406,30 ton, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Riau. Sumatera Selatan menduduki peringkat ke 7 (tujuh) sebagai provinsi yang memberikan sumbangsih sampah terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 1.326.447,73 ton.

Kota Palembang menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbanyak di Sumatera Selatan. Berperan sebagai ibukota Sumatera Selatan menjadikan Kota Palembang sebagai pusat kota dan pusat aktivitas penduduk yang tentunya tidak

terlepas dari permasalahan sampah perkotaan. Tingkat produksi sampah yang tinggi mengakibatkan tidak semua sampah dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir di Sukawinatan. Kota Palembang diperkirakan menghasilkan sampah sekitar 1.180 ton per harinya. Dari total jumlah tersebut, hanya sekitar 900 ton sampah yang dapat diangkut.

Tabel 2. Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
1.	Kota Palembang	1.204,97	439.815,66
2.	Kab. Banyuasin	578,73	211.235,90
3.	Kab. Muara Enim	432,36	157.811,87
4.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	282,14	102.981,68
5.	Kab. Lahat	269,61	98.406,85
6.	Kab. Musi Banyuasin	257,93	94.145,47
7.	Kab. Musi Rawas	255,50	93.259,27
8.	Kab. Ogan Komering Ulu	152,21	55.556,50
9.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	102,24	37.316,32
10.	Kota Prabumulih	98,41	35.918,19

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK

Berdasarkan data di atas, Kota Palembang menghasilkan sampah dengan jumlah yang sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Dimana per harinya, Kota Palembang dapat memproduksi sampah hingga 1.204,97 ton dan 439.815,66 ton per tahun. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Kota Palembang juga terus mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah yaitu pada tahun 2019 sebanyak

424.869,16 ton, tahun 2020 sebanyak 426.390,66 ton, tahun 2021 sebanyak 430.791,65 ton dan pada tahun 2022 sebanyak 439.815,66 ton sampah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Timbulan Sampah Kota Palembang Tahun 2019-2022

Tahun	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2019	1.164,03	424.869,16
2020	1.168,19	426.390,66
2021	1.180,25	430.791,65
2022	1.204,97	439.815,66

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK

Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah sampah yang dihasilkan yaitu jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk ini akan mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan pun akan semakin bertambah (Afriandi dkk., 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang pada tahun 2022, penduduk Kota Palembang mencapai 1.729.546 jiwa. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan sangat banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan sampah ini kemudian tidak diiringi dengan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang ada. Banyak masyarakat yang belum sadar untuk memilah atau memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat terurai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Dilansir dari *Kompas.com*, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang menyatakan bahwa Kecamatan Ilir Barat I merupakan wilayah penghasil sampah terbanyak di Kota Palembang, dikarenakan wilayah tersebut

merupakan wilayah sentral dan memiliki jumlah pasar terbanyak. Selain itu, berdasarkan data dari BPS Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kota Palembang yaitu sebesar 150.381 jiwa pada tahun 2022. Mengacu pada hasil penelitian dari (Afriandi dkk., 2020) yang menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk mempengaruhi banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan.

Pada wawancara tanggal 12 Desember 2023, Wakil Kepala UPTD LH Kecamatan Ilir Barat I menyatakan bahwa memang benar Kecamatan Ilir Barat I menjadi wilayah yang menghasilkan sampah dalam jumlah terbanyak. Namun, jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi sampah yang dihasilkan penduduk lokal Kecamatan Ilir Barat I dengan para pendatang, mengingat bahwa Kecamatan Ilir Barat I merupakan pusat kota dengan jumlah hotel, kafe, dan restoran yang banyak. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengetahui perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Ilir Barat I dapat menghitungnya dengan rumus jumlah penduduk dikali 0,7. Hal ini sesuai dengan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, bahwa jumlah timbulan sampah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Timbulan sampah (kg/org/hari)} = \text{jumlah penduduk} \times 0,7$$

Maka jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kecamatan Ilir Barat I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Perkiraan Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah Per Hari	Jumlah Timbulan Sampah Per Bulan
2020	143.877	100.713,9 kg (100,71 ton)	3.021.417 kg (3.021,42 ton)
2021	147.608	103.325,6 kg (103,33 ton)	3.009.768 kg (3.009,77 ton)
2022	150.381	105.266,7 kg (105,27 ton)	3.158.001 kg (3.158,00 ton)

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka 2021, 2022, dan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa, setiap orang/penduduk di Kecamatan Ilir Barat I per harinya dapat menghasilkan sampah sekitar 100 ton dan 3 ribu ton setiap bulan, serta terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Mengingat produksi sampah tidak hanya berasal dari penduduk lokal maka kemungkinan jumlah sampah yang dihasilkan lebih banyak dari hasil penghitungan dalam tabel 5. Namun, dari ribuan ton sampah yang dihasilkan setiap bulannya, hanya beberapa ton saja yang dapat terangkut oleh DLHK Kota Palembang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I yang Terangkut ke TPA Sukawinatan Tahun 2023

Bulan	Jumlah Sampah
Januari	1.691,46 ton
Februari	1.456,79 ton
Maret	1.577,13 ton
April	1.368,44 ton
Mei	1.465,35 ton
Juni	1.296,85 ton
Juli	1.441,29 ton
Agustus	1.290,29 ton
September	1.328,52 ton
Oktober	1.158,35 ton
November	1.210,46 ton
Desember	1.279,36 ton

Sumber : UPTD TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah sampah Kecamatan Ilir Barat I yang dapat diangkut ke TPA hanya sekitar 1.600 ton per bulannya atau sekitar 50 ton per hari. Maka dari itu, diperlukan tindakan dan kepedulian yang nyata terhadap lingkungan dalam rangka mengurangi timbulan sampah sehingga dapat pula mengurangi jumlah gunungan sampah yang ada di TPA. Mengingat tidak semua sampah yang ada di TPA dapat terkelola.

Masalah sampah tersebut kemudian menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah di daerah yaitu dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi yang didasarkan pada kebijakan nasional dan provinsi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah terbagi menjadi dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dimulai dari pemilik sampah (sumber) hingga ke tempat pembuangan sementara (TPS), sedangkan penanganan sampah dimulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kegiatan pengurangan sampah berperan sangat penting karena berpengaruh terhadap jumlah sampah yang akan dibawa ke TPA. Salah satu program untuk mendukung pengurangan sampah adalah Bank Sampah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 tersebut, Pemerintah Kota harus menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan sampah. Dimana hal tersebut kemudian dijelaskan kembali pada pasal 8

yang menyatakan salah satu arah kebijakan pengurangan sampah yaitu pengurangan sampah pada sumber dan salah satu strateginya yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi. Maka dari itu, diadaptasikan dan didirikan Bank Sampah bersama masyarakat untuk membantu mengatasi masalah sampah di wilayah Kota Palembang, yang dijadikan sarana untuk mengurangi sampah dan sebagai model untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, disebutkan bahwa Bank Sampah adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, dimana bank sampah ini dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Salah satu bentuk Bank Sampah adalah BSU (Bank Sampah Unit) yang melayani pengelolaan sampah di level RT, Kelurahan, atau Desa. Jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah dapat berupa sampah organik maupun non-organik. Bank Sampah ini berusaha membantu dan memberdayakan masyarakat untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Selain itu, Bank Sampah juga dapat digunakan sebagai fasilitas untuk mengubah perilaku masyarakat yang sadar akan masalah sampah dan bersedia untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah. Dengan ini, Bank Sampah diharapkan dapat membantu mengatasi masalah persampahan dengan mengurangi volume timbulan sampah, sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanya sampah sisa yang memang tidak bisa dikelola secara mandiri.

Apabila Bank Sampah dapat berjalan dengan optimal dan efektif, harapannya timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA dapat berkurang. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sehingga dapat tercipta suatu tata kelola lingkungan yang baik atau *good environmental governance*. *Good Environmental Governance* adalah suatu tata kelola lingkungan yang baik, yang didalamnya melibatkan seluruh *stakeholder* karena mereka memiliki peran yang berdampak pada lingkungan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat, LSM, pemerintah, dan sektor swasta yang saling bekerja sama untuk menciptakan suatu pemerintahan yang efektif menuju masa depan yang berkelanjutan (Huong, 2010 dalam (Nafi'ah, 2015). Dengan kata lain, suatu tata kelola lingkungan yang baik dapat terwujud apabila seluruh aktor di dalamnya saling bekerja dan mengupayakan sesuai dengan peran masing-masing untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Tata lingkungan yang baik tersebut dapat tercapai apabila suatu program lingkungan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip atau telah menerapkan prinsip *good/effective environmental governance*, termasuk dalam program Bank Sampah.

Guna mengatasi masalah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I, Pemerintah Kota Palembang dan pemerintah setempat telah memiliki dan membina program Bank Sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I memiliki tiga Bank Sampah yang tersebar di beberapa kelurahan, yaitu Bank Sampah Kartini di Kelurahan Lorok Pakjo, Bank Sampah *Eco Green House* di Kelurahan Siringagung, dan Bank Sampah Ittifaq di Kelurahan Bukitbaru. Namun, berdasarkan survey di lapangan, saat ini Kecamatan Ilir Barat I hanya memiliki satu Bank Sampah yang masih beroperasi dan aktif hingga sekarang yaitu Bank Sampah Kartini. Keberadaan Bank Sampah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I

sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah sekitar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan perkiraan sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui *good/effective environmental governance* pada program Bank Sampah tersebut, karena pada dasarnya Bank Sampah merupakan salah satu sarana atau upaya untuk menciptakan suatu tata kelola lingkungan yang baik khususnya di bidang persampahan.

Penelitian tentang Bank Sampah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Di Palembang sendiri sudah pernah dilakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah, tepatnya yaitu Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa. Dimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat terlaksana dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan monitoring/evaluasi (Darmawan & Tahyudin, 2019). Pada tahap perencanaan, masyarakat hadir dalam musyawarah, mengusulkan ide, dan ikut dalam pengambilan keputusan. Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat yaitu membantu pelaksanaan, memberikan usulan, dan memberikan informasi. Pada tahap pengambilan manfaat, masyarakat ikut menikmati keuntungan dan memelihara lingkungan sekitar. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat ikut serta mengawasi pengembangan Bank Sampah, dan memberikan kritik dan saran. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah, belum menilai dari sisi yang lebih kompleks untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang baik.

Penelitian lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh (Asteria & Heruman, 2016) yang berjudul Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis

Masyarakat di Tasikmalaya. Hasil penelitian ini yaitu program Bank Sampah telah mendorong adanya *capacity building* masyarakat yang membentuk kemandirian dan keswadayaan masyarakat melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan. Selain itu, Bank Sampah telah menstimulasi kreativitas dan inovasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mendaur ulang sampah. Hasil penelitian ini lebih menggambarkan capaian program atau manfaat program Bank Sampah bagi masyarakat. Namun, belum membahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik yang harus dipenuhi oleh program Bank Sampah.

Selanjutnya yaitu penelitian dari (Mas Rara Tri Retno Herryani & Zaenal Arifin, 2023) yang berjudul Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori *good environmental governance* dari Belbase. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan 7 prinsip *good environmental governance* dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Beberapa prinsip yang terlaksana dengan baik yaitu, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi dan akses terhadap keadilan. Sedangkan prinsip aturan hukum, lembaga dan institusi, dan pengelolaan anggaran belum terlaksana dengan optimal. Namun penelitian ini tidak membahas lebih dalam terkait prinsip lain dari *good environmental governance* yang sangat penting, seperti pemberdayaan, komunikasi, dan kesadaran.

Berdasarkan uraian di atas, alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah: *Pertama*, Kota Palembang merupakan penghasil sampah terbanyak di Sumatera Selatan. *Kedua*, fakta bahwa terjadi peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya di Kota Palembang dan dari total timbulan sampah tidak semua dapat

terkelola. *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. *Keempat*, Kecamatan Ilir Barat I merupakan penghasil sampah terbanyak di Kota Palembang. Guna mengurangi masalah sampah tersebut, kemudian didirikan Bank Sampah, dengan harapan mampu membantu Pemerintah Kota dalam mengatasi masalah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I sehingga mampu menciptakan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, dan lestari. Meskipun berdasarkan kenyataan dan penemuan di lapangan, pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah di Kota Palembang, khususnya Kecamatan Ilir Barat I masih dikatakan belum berjalan dengan baik. Seharusnya, adanya program Bank Sampah ini dapat memberikan efek dan manfaat untuk mengurangi masalah sampah yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Barat I. Oleh karena itu, pelaksanaan Bank Sampah hendaknya memperhatikan dan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak secara optimal dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam masalah pengelolaan sampah agar jumlah sampah yang dihasilkan dapat dikurangi timbulannya. Maka dari itu penelitian ini akan melakukan riset lebih lanjut apakah Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I telah menerapkan atau memenuhi prinsip *good environmental governance* untuk menciptakan suatu pengelolaan lingkungan yang baik serta menemukan dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang menjadikan program Bank Sampah ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam proses pengelolaan sampah di bidang pengurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?
2. Apa saja faktor penghambat dari Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
2. Mengetahui faktor penghambat dari Penerapan *Good Environmental Governance* Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini sekiranya akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait penerapan *good environmental governance* dan proses deliberasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang program Bank Sampah, khususnya di Kecamatan Ilir Barat I sebagai salah satu program penanganan

masalah lingkungan di bidang persampahan untuk mewujudkan *good environmental governance*.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penerapan *good environmental governance* berbasis masyarakat dalam program Bank Sampah di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam penanganan masalah lingkungan di bidang persampahan agar tercipta suatu tata lingkungan yang baik, khususnya bagi masyarakat di sekitar Bank Sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I.
- c. Bagi Fakultas/Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bidang studi ilmu sosial politik, serta menambah bahan materi terkait *good environmental governance*, khususnya pada program Bank Sampah sebagai salah satu program pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya.
- d. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan program penanganan masalah lingkungan di bidang persampahan, khususnya pada program bank sampah.
- e. Bagi Subjek Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan dalam meningkatkan penerapan *good environmental governance* melalui program-program penanganan masalah lingkungan berbasis masyarakat, khususnya Bank Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Silalahi, U. (2017). *Asas-Asas Manajemen* (Cetakan Keempat). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental governance: Isu, kebijakan, dan tata kelola lingkungan hidup* (Cetakan pertama). Malang: UB Press.

Jurnal:

- Abadi, R. S. (2013). Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Domestik di Kampung Menoreh, Kelurahan Sampangan, Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(1), 87-96. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6529>
- Afriandi, M. N., Harahap, R., & Sarifah, J. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. *Buletin Utama Teknik*, 15(3), 287-293.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (*Waste Banks*) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136-141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Darmawan, B., & Tahyudin, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang. *Jurnal Empirika*, 4(1), 33-48.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174-188. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>

- Famelasari, R., & Chiquita, M. (2018). Praktik *Good Environmental Governance* dan *Sustainable Rural Development* Studi Kasus: Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Brawijaya*, 10(1).
<https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/154>
- Frinaldi, A., Saputra, B., Mubarak, A., Jumiaty, Renaldi, I., & Humaida, H. (2022). *Good Environmental Governance Model in Domestic Waste Management in Batang Arau, West Sumatera*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1098(1), 012002, 1-8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1098/1/012002>
- Henriyani, E. (2018). Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Birokrasi Pemerintah. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 26–39.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>
- Indrianti, N. (2016). *Community-based Solid Waste Bank Model for Sustainable Education*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224, 158–166.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.431>
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1-23. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.794>
- Lestari, E. R., Putri, H. K., Anindita, C., & Laksmiari, M. B. (2020). Pengaruh *Green Product* (Minuman Ramah Lingkungan), *Green Advertising*, dan Kepedulian Lingkungan Terhadap *Green Trust* dan Implikasi Terhadap Minat Beli. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 21(1), 1–10.
<https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2020.021.01.1>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1), 66-74. <https://doi.org/10.20527/jukung.v3i1.3201>
- Mardiyanta, A. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan. 24(3).
- Mas Rara Tri Retno Herryani & Zaenal Arifin. (2023). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya.

- Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1), 109-119.
<https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4667>
- Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Nafi'ah, B. A. (2015). Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam *Good Environmental Governance* Di Kota Blitar. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(3), 218–228.
- Nopyandri, N. (2014). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 80–94.
- Nugroho, A. H. (2015). Evaluasi Prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 1–10.
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, 5(2), 155–162. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v5i2.185>
- Nur, M. S., & Husen, A. (2022). *Good Environmental Governance* dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35-49.
- Peramesti, N. P. D. Y. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 4(1).
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/194>
- Pontoh, M. Q. F., Suaib, M. R., & Kamaluddin, K. (2019). Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam Pencapaian Program Lingkup Sekretariat Pemerintah

- Kabupaten Sorong. *FAKSI: Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik*, 3(4), 24–41.
- Purwanto, P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali dalam Rangka Mewujudkan Prinsip *Good Environmental Governance*. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 168–181. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v19i2.2533>
- Putri, C. D., Mindarti, L. I., & Nurani, F. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif *Good Environmental Governance*.
- Riswana, I., Rukmana, D., & Bulkis, S. (2018). Strategi Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang*, XIV(1), 68–80. <https://doi.org/10.33658/jl.v14i1.110>
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 304-314. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41314>
- Sugiarto, A., & Gabriella, D. A. (2020). Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 260-275. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>
- Sutinah Andaryani, Dwikurniawati, I. U., & Rusdi, R. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 47–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12551](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12551)
- Utari, E., Yanti, D. K., Amelia, L., & Humairoh, M. (2023). Analisis dampak Bank Sampah Wangun di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 19–27. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.19-27>
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). *Waste Bank as Community-based Environmental Governance: A Lesson Learned from Surabaya*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>

Website:

Putra, A., & Ika, A. (2021, Februari 01). *Sampah di Palembang Tembus 1.200 Ton Per Hari, Terbanyak di Area Pasar*.
<https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/19472511/sampah-di-palembang-tembus-1200-ton-per-hari-terbanyak-dari-area-pasar>. Tanggal Akses 4 Oktober 2023.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Tanggal Akses:

Dokumen & Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Rencana Strategis Revisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Publikasi:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2023). *Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka 2023*.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2023). *Kota Palembang Dalam Angka 2023*.